



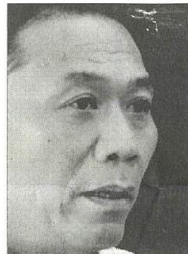
# Geser Rp60 Miliar untuk Pemilu 2024

## Pemkab Landak Tunda Pembentukan Dinas Damkar

**LANDAK, SP** - Skala prioritas daerah dengan anggaran yang minim dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), mengharuskan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Landak menunda pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar). Selanjutnya menggeser anggaran senilai Rp60 miliar lebih untuk pelaksanaan Pemilu mulai tahun 2023 hingga 2024.

"Pemerintah Kabupaten

Landak wajib melakukan efisiensi penganggaran pada perangkat daerah. Salah satu caranya adalah penundaan pembentukan Damkar menjadi dinas, dan memaksimalkan kinerja Unit Damkar yang telah terbentuk di hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Landak," ungkap Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Landak Visensius SSos MMA di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Landak, Rabu (15/2).



**Visensius**  
Sekda Landak

**Pemerintah Kabupaten Landak wajib melakukan efisiensi penganggaran pada perangkat daerah. Salah satu caranya adalah penundaan pembentukan Damkar menjadi dinas, dan memaksimalkan kinerja Unit Damkar yang telah terbentuk di hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Landak"**

Mewakili Penjabat (Pj) Bupati Landak, Sekda Visensius menghadiri Rapat Paripurna ke-4 Masa Sidang III Tahun 2023 DPRD Kabupaten Landak dengan agenda Penyampaian Jawa-

ban Pj Bupati Landak Atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Landak Terhadap Pidato Pengantar Raperda Tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Kabupaten Landak Nomor 5

Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak.

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Landak, Heri Saman

SH MH turut dihadiri Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Landak, para Asisten Setda Landak, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Kabupaten Landak, para Kepala Bagian Setda Landak, dan tamu undangan lainnya.

Visensius yang membacakan Pidato Jawaban Pj Bupati Landak menyampaikan penghargaan dan mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya atas disampaikannya Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Raperda Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

"Kami menyambut baik dan berterimakasih atas saran, pendapat, maupun pernyataan yang telah disampaikan dalam Rapat Paripurna pada tanggal 14 Februari 2023. Semoga dengan adanya perubahan dan penyesuaian susunan perangkat daerah mampu mengurangi beban biaya operasional. Sehingga lebih efisien dari sisi anggaran, namun tidak mengurangi efektivitas kinerja dan hasilnya," ujar Visensius.

Tidak lupa Visensius mengucapkan terimakasih kepada Ketua, para Wakil Ketua, dan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Landak yang telah menghadiri rapat paripurna tersebut.(rls)